



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 237/KUM/2026

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI TABALONG NOMOR
100.3.3.2/34/KUM/2026 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA
ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya Keputusan Bupati Tabalong Nomor 800.1.3.3/61-KEP.MPKA/BKPSDM tentang Pengangkatan Pejabat Fungsional yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala UPTD Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, serta adanya surat usulan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong B.1456/DINKES/900/V/2026 tentang Usulan Perubahan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong, maka untuk kepentingan tugas-tugas dinas dipandang perlu menunjuk kembali pejabat/pegawai yang memenuhi syarat untuk disertai tugas dan tanggung jawab sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 100.3.3.2/34/KUM/2026 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat

Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Bupati Tabalong Nomor 100.3.3.2/34/KUM/2026 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Bupati Tabalong Nomor 100.3.3.2/175/KUM/2026 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 100.3.3.2/34/KUM/2026 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong yang telah ditetapkan pada tanggal 8 April 2026, diubah sebagai berikut:

- Ketentuan dalam Lampiran Nomor Urut 2, Nomor Urut 6, Nomor Urut 8, Nomor Urut 9, Nomor Urut 10, Nomor Urut 12, Nomor Urut 14 dan Nomor Urut 18 pada kolom 5 diubah sehingga Nomor Urut 2, Nomor Urut 6, Nomor Urut 8, Nomor Urut 9, Nomor Urut 10, Nomor Urut 12, Nomor Urut 14 dan Nomor Urut 18 pada kolom 5 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 6 Mei 2026.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	<i>h</i>
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	<i>te</i>

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>h</i>
ASISTEN	<i>h</i>
KADIS/KABAN	<i>h</i>

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 4. Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong (Bank Kalsel Cab.Tanjung) di Tanjung.
 5. Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 237 /KUM/2026
TANGGAL 6 Mei 2026

DAFTAR PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TABALONG

NO.	NAMA SKPD/UNIT KERJA	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	NAMA/NIP/PANGKAT/JABATAN	
				KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1	2	3	4	5	6
1	RSUD H. BADARUDDIN KASIM	1.02.01.2.01.0001	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	SETYAWAN ANDRI WIBOWO, S.Farm.APT NIP 19871018 201402 1 003 Direktur RSUD H Badaruddin Kasim	EKA SAMIANA ELPA NIP 19850111 201101 2 012 Staf Fungsional pada RSUD H Badaruddin Kasim
		1.02.01.2.01.0001.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		
		1.02.01.2.01.0001.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		
		1.02.01.2.01.0001.0022	Pengembangan Rumah Sakit		
		1.02.01.2.01.0001.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
		1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		
		1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara		
		1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
		1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
		1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		

1	2	3	4	5	6
		1.02.01.2.06 1.02.01.2.06.0002 1.02.01.2.08 1.02.01.2.08.0004 1.02.01.2.10 1.02.01.2.10.0001	Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
2	PUSKESMAS TANJUNG	1.02.02 1.02.02.2.02 1.02.02.2.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Operasional Pelayanan Puskesmas	dr. IN YATUN NISA NIP 19820616 201001 2 024 Pimpinan Puskesmas Tanjung	ROSMILIANI, A.MG NIP 19800408 200604 2 024 Nutrisioni Penyelia pada PKM Tanjung
3	PUSKESMAS HIKUN	1.02.02 1.02.02.2.02 1.02.02.2.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Operasional Pelayanan Puskesmas	dr. NOVIAN EKA HARIADI NIP 19851121 201101 1 010 Pimpinan Puskesmas Hikun	MAULIDA NOVITASARI, A.MK NIP 19871111 201001 2 023 Perawat Penyelia pada PKM Hikun
4	PUSKESMAS MURUNG PUDAK	1.02.02 1.02.02.2.02 1.02.02.2.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Operasional Pelayanan Puskesmas	dr. H. AGUS SUSENO, M.Kes NIP 19690808 200012 1 001 Pimpinan Puskesmas Murung Pudak	APRIDA RAMADHANI, S.Keb, Bdn NIP 19870430 201001 2 020 Bidan Penyelia pada PKM Hikun

1	2	3	4	5	6
5	PUSKESMAS MABUUN	1.02.02 1.02.02.2.02 1.02.02.2.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Operasional Pelayanan Puskesmas	drg. Hj. TENRY ARINY NIP 19801119 200604 2 012 Pimpinan Puskesmas Mabuun	IRVA IRIYANA, S.Fis, Ftr NIP 19931016 202012 2 011 Fisioterapi Ahli Pertama pada PKM Mabuun
6	PUSKESMAS TANTA	1.02.02 1.02.02.2.02 1.02.02.2.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Operasional Pelayanan Puskesmas	dr. ONY ERAWATI, MM NIP 19791118 200604 2 018 Pimpinan Puskesmas Tanta	AYU WULANDARI, A.Md.RMIK NIP 19960303 201903 2 017 Perekam Medis Mahir pada PKM Tanta
7	PUSKESMAS MUARA HARUS	1.02.02 1.02.02.2.02 1.02.02.2.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UMM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Operasional Pelayanan Puskesmas	MARIA MARAYATI, S.Kep.Ns NIP 19701115 199803 2 006 Pimpinan Puskesmas Muara Harus	M. ZAINAL ABIDIN, SKM NIP 19970617 202012 1 006 Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama pada PKM Muara Harus
8	PUSKESMAS KELUA	1.02.02 1.02.02.2.02 1.02.02.2.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Operasional Pelayanan Puskesmas	Hj. HARLIANI, S.ST, Bdn, MM NIP 19690629 199002 2 001 Pimpinan Puskesmas Kelua	APRILYANA SINAGA, A.Md.Keb NIP 19890417 201101 2 011 Bidan Mahir pada PKM Kelua
9	PUSKESMAS MUNGKUR AGUNG	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Hj. EKA RAHMADIYANTI, S.Kep.Ns NIP 19800207 200604 2 015 Pimpinan Puskesmas Mungkur Agung	AHYATUL FAJRI, A.Md.RMIK NIP 19950410 201903 1 013 Perekam Medis Terampil pada PKM Mungkur Agung

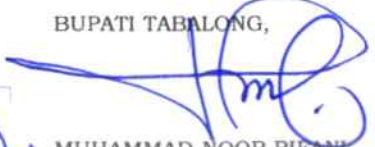
1	2	3	4	5	6
14	PUSKESMAS HARUAI	1.02.02 1.02.02.2.02 1.02.02.2.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Operasional Pelayanan Puskesmas	dr. WAHYU ADITIA HUSADA PUTERA NIP 19920828 201903 1 010 Pimpinan Puskesmas Haruai	SITI NUUR JANNAH, S.Kep.Ns NIP 19951107 202012 2 022 Perawat Ahli Pertama pada PKM Haruai
15	PUSKESMAS UPAU	1.02.02 1.02.02.2.02 1.02.02.2.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Operasional Pelayanan Puskesmas	H. EVI LIDIA, S.Kep.Ns, MM NIP 19760628 199803 1 001 Pimpinan Puskesmas Upau	MAHLIMAH, SST NIP 19911105 201402 2 004 Bidan Ahli Pertama pada PKM Upau
16	PUSKESMAS RIBANG	1.02.02 1.02.02.2.02 1.02.02.2.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Operasional Pelayanan Puskesmas	AHMAD RUSYDIANI, S.Kep.Ns NIP 19671021 198903 1 003 Pimpinan Puskesmas Ribang	SITI KURNIAWATI, S.SiT.Bdn NIP 19770707 200604 2 039 Bidan Ahli Muda pada PKM Ribang
17	PUSKESMAS MUARA UYA	1.02.02 1.02.02.2.02 1.02.02.2.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Operasional Pelayanan Puskesmas	H. TUGIARGO, S.Kep.Ns NIP 19671014 198903 1 008 Pimpinan Puskesmas Muara Uya	YULIDA RAHMI, A.Md.Kg NIP 19941217 201903 2 014 Terapis Gigi dan Mulut Penyelia pada PKM Muara Uya
18	PUSKESMAS WIRANG	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	dr. ENDAR WIBOWO, MM NIP 19741127 200604 1 022 Pimpinan Puskesmas Wirang	M. YUSUF MUHTADIN, A.Md.Kg NIP 19951026 201903 1 005 Terapis Gigi dan Mulut Mahir pada PKM Wirang

1	2	3	4	5	6
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
		1.02.02.2.02	Operasional Pelayanan Puskesmas		
19	PUSKESMAS JARO	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	dr. Hj. SEMIATUN NIP 19740311 200604 2 017 Pimpinan Puskesmas Jaro	MERA YULIANI, AMK NIP 19900308 201101 2 005 Perawat Penyelia pada PKM Jaro
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
		1.02.02.2.02	Operasional Pelayanan Puskesmas		

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASUBKASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOG INASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADISKABAN	

BUPATI TABALONG,


 MUHAMMAD NOOR RIFANI

1	2	3	4	5	6
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
		1.02.02.2.02	Operasional Pelayanan Puskesmas		
10	PUSKESMAS PUGAAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	dr. ARIYO SUSANTO NIP 19841224 201407 1 001 Pimpinan Puskesmas Pugaan	RINA JENIANTI, SKM NIP 19910611 201903 2 022 Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Muda pada PKM Pugaan
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
		1.02.02.2.02	Operasional Pelayanan Puskesmas		
11	PUSKESMAS BANUA LAWAS	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	dr. H. HIMAWAN INDARYANTO NIP 19790307 201001 1 019 Pimpinan Puskesmas Banua Lawas	HARLIANI, S.Sos NIP 19820528 200701 1 002 Penata Layanan Operasional pada PKM Banua Lawas
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
		1.02.02.2.02	Operasional Pelayanan Puskesmas		
12	PUSKESMAS BINTANG ARA	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	dr. Hj. AMIYANI NIP 19780116 201101 2 003 Pimpinan Puskesmas Bintang Ara	RINITA, A.Md.RMIK NIP 19970505 201903 2 004 Perekam Medis Terampil pada PKM Bintang Ara
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
		1.02.02.2.02	Operasional Pelayanan Puskesmas		
13	PUSKESMAS PANAAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	dr. IQBAL FIDA MAULANA NIP 19910616 201903 1 013 Pimpinan Puskesmas Panaan	NORLISA RAHMADINA, A.Md.Kg NIP 19950613 201903 2 022 Terapis Gigi dan Mulut Terampil pada PKM Panaan
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
		1.02.02.2.02	Operasional Pelayanan Puskesmas		